

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

"Kembali ke Khittah 1926" adalah suatu titik kulminasi dalam sejarah NU, yang nilainya barangkali hanya bisa ditandingi oleh peristiwa kelahirannya dahulu. Sementara kontroversinya jelas tidak tertandingi oleh titik sejarah NU manapun. Sedemikian rupa, sehingga kontradiksi dalam tubuh organisasi ini selalu dibangun atas dasar semangat Khittah 1926. Itulah sebabnya ketika semua tokoh NU merujuk pada khittah, mereka bisa saja memiliki sikap yang berbeda, bahkan terkadang saling bertentangan, terhadap suatu hal tertentu. Ini sekaligus bermakna positif maupun negatif. Positif, sejauh perbedaan itu menjamin kontinuitas dinamika NU. Dan negatif karena bisa saja orang luar menilai NU tidak pernah benar-benar memiliki persamaan visi dan persepsi. Kendati demikian, khittah tidak diragukan lagi telah mendorong NU untuk melakukan serangkaian transformasi, yang sebagian telah menunjukkan hasil yang signifikan, sementara sebagian lainnya masih berjalan tersendat-sendat.

Dengan ini agaknya mulai dapat dibuat simplikasi jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam Bab I:

Bagaimana dinamika NU dalam implementasi keputusan untuk kembali ke Khittah 1926 ? kearah mana dinamika itu berjalan ?

Dalam lingkup internal, inti dinamika NU adalah transformasi ke arah pengembangan supremasi ulama yang, seperti disebutkan di atas, hingga saat ini belum juga berhasil menemukan format terbaiknya.

Selanjutnya pada lingkup eksternal, Bab IV meng-cover argumen bahwa dinamika NU adalah berkaitan dengan reorientasi dari kuantitas menuju kualitas politik. Dan ini akan sekaligus menjawab rumusan masalah pertanyaan yang kedua :

Bagaimana model kepolitikan NU berkaitan dengan implementasi di atas ?

Tentang reorientasi politik NU, rupa-rupanya para pengamat mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Sebagian menilai NU pasca khittah adalah NU yang sama sekali tidak berpolitik, sementara yang lainnya meyakini bahwa hanya aktifitas politik praktis yang kini ditinggalkan NU, dan sisanya beranggapan bahwa NU pasca khittah masih membingungkan : berpolitik atau tidak, dan bagaimana.

Kajian ini hendak menyimpulkan bahwa kepolitikan NU

purna khittah sebenarnya telah cukup jelas. Sederhana saja, setelah kembali ke khittah, NU sebagai organisasi melepaskan *concernnya* terhadap politik praktis dan kelembagaan yang didasarkan pada kalkulasi kuantitatif. Persoalan itu diserahkan sepenuhnya kepada warga secara individual, dan sebagai lembaga, NU berpolitik dalam arti yang lebih luas di dalam konteks sebuah komitmen: bagaimana NU bisa menjadi kekuatan komplementer yang mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap usaha peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. tidaklah tepat.

B. REKOMENDASI

Kiranya, sampailah kita untuk menginventarisir beberapa persoalan yang tersisa dari diskusi ini sebagai *puzzles* bagi penelitian lebih jauh. Pertama, jika di atas disimpulkan bahwa inti dinamika internal NU adalah transformasi ke arah pengembalian supremasi ulama yang hingga saat ini belum juga menemukan formula terbaiknya, maka setidaknya ada dua pertanyaan di sini: akankah NU mampu segera menemukan bentuk terbaik bagi pengembalian supremasi ulama itu ? Dan, sekalipun dalam Bab-bab sebelumnya telah dilihat beberapa kemungkinan, bagaimana kiranya pola yang akan dipilih NU ? Pertanyaan ini cukup signifikan, sebab wujud idea supremasi ulama itu akan

sangat menentukan perwajahan NU nantinya, sebagaimana setiap pergeseran dalam distribusi kewenangannya selalu turut menentukan perkembangan organisasi ini, baik di tahun 1934, 1952, maupun 1980-an.

Selanjutnya, pilihan NU terhadap mekanisme informal dalam upaya aksesnya pada pembuatan kebijaksanaan publik sebenarnya menjadikan efektifitas pengaruhnya terhadap proses politik yang sedang berjalan sulit diukur. Sebagian pengamat menilai bahwa NU selalu gagal mempengaruhi kebijakan, sementara mereka menyetujui kemampuan NU untuk menggalang massa. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian lebih lanjut dengan rumusan-rumusan yang jelas tentang ukuran efektifitas penageruh itu untuk menjawab persoalan apakah NU benar-benar mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara atau tidak.